

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari perspektif teori konflik bersenjata dan intervensi militer, intervensi Rusia dalam konflik Suriah tahun 2015 mencerminkan pola khas intervensi kekuatan besar dalam perang modern. Rusia tidak hanya bertindak sebagai pendukung rezim Bashar al-Assad, tetapi juga sebagai aktor militer eksternal yang memainkan peran dominan dalam menentukan arah konflik melalui kekuatan udara. Penggunaan serangan udara masif dengan berbagai jenis senjata berdaya hancur tinggi seperti bom konvensional tak berpemandu, rudal jelajah Kalibr, bom termobarik, bom curah, dan senjata pembakar menunjukkan strategi intervensi yang mengutamakan dominasi militer dan proyeksi kekuatan jarak jauh dengan risiko minimal terhadap personel sendiri. Intervensi ini memperlihatkan bagaimana kekuatan militer modern memadukan kecanggihan teknologi dengan kepentingan geopolitik dalam kerangka perang proksi.

Dalam kerangka teori intervensi militer, tindakan Rusia menegaskan bahwa tujuan utama dari intervensi bukan semata-mata penghancuran kelompok teroris, melainkan juga konsolidasi kekuasaan politik sekutu domestik, dalam hal ini rezim Assad. Strategi militer yang dijalankan lebih menekankan efektivitas serangan dan dominasi teritorial ketimbang perlindungan warga sipil, sehingga menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang luas mulai dari korban sipil, kehancuran infrastruktur, hingga krisis pengungsi. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi militer dalam konflik internal seringkali memperpanjang eskalasi kekerasan, mengubah sifat konflik dari perang domestik menjadi ajang perebutan pengaruh

global. Maka dengan demikian, intervensi Rusia di Suriah menjadi ilustrasi nyata bahwa dalam konteks konflik bersenjata kontemporer, kekuatan militer digunakan tidak hanya untuk mencapai kemenangan di medan perang, tetapi juga untuk memperkuat posisi politik negara intervensi, meskipun dengan mengorbankan stabilitas jangka panjang dan nilai-nilai kemanusiaan.

Melihat dampak luas dari intervensi militer terhadap dinamika konflik dan kehidupan sipil, perlu ada upaya serius dari komunitas internasional untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara intervensi, termasuk Rusia. Selain itu, dalam merespons konflik bersenjata, pendekatan militer seharusnya diimbangi dengan strategi politik dan diplomasi yang mengedepankan penyelesaian damai serta perlindungan terhadap warga sipil. Penelitian ini juga menyarankan agar kajian akademik di masa depan dapat memperluas fokus pada evaluasi jangka panjang dari intervensi militer dalam konteks stabilitas pascakonflik, serta peran teknologi militer dalam mengubah karakteristik perang di abad ke-21. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan studi keamanan, hak asasi manusia, dan hubungan internasional diperlukan untuk memahami dampak menyeluruh dari intervensi militer dalam konflik internal negara.